

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH KOTA DUMAI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2023**

(KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 973/764/2023)

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 973/764/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D);
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 35 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal Agustus 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Wali kota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Dokumen Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Renja ini, terutama kepada seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Dumai yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, Agustus 2023
INSPEKTUR DAERAH,

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730929 199303 1 003



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 973/764/2023

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d. TW II Tahun 2023 8

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

BAB IV PENUTUP 40

LAMPIRAN

1. Tabel Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023 hasil inputan pada website SIPD;

2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 2.3	Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Kota Dumai	22
Tabel 2.4	Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau	24
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	35



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, dan Renja Provinsi. Adapun proses/tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Wali kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

- a. Rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, mencakup:
 - analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW II tahun berkenaan; dan
 - penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan perubahan Renja, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan TW II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup.

Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Wali kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diterima.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali kota melalui Bappedalitbang untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Bappedalitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappedalitbang dan menyampaikannya kembali ke Bappedalitbang. Verifikasi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

3. Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Bappedalitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali kota ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disusun setelah Inspektorat Daerah menerima surat Wali Kota Nomor 050/926/BAPPEDALITBANG tanggal 13 Juni 2023 tentang Penyampaian Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023. Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali Kota melalui Bappedalitbang untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah selanjutnya disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Rancangan akhir perubahan Renja kemudian disampaikan kepada Wali Kota melalui Bappedalitbang untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Inspektorat Daerah telah selaras dengan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Setelah dilakukan penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renja berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappedalitbang, penyempurnaan rancangan akhir Renja tersebut disampaikan kembali ke Bappedalitbang untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perubahan Renja

Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali kota. Perubahan Renja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali kota ini akan menjadi pedoman dalam menyusun perubahan RKA Inspektorat Daerah Tahun 2023

Dokumen perubahan Renja Tahun 2023 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perumusan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
23. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
24. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 35 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh Inspektur Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023. Adapun tujuannya adalah untuk

memastikan bahwa Perubahan Renja Inspektorat Daerah ini telah disusun selaras dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023. Penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap dokumen Perubahan Renja Inspektorat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja, serta keterkaitan antara rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah dengan rancangan akhir dokumen perubahan RKPD Kota Dumai tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d. TW II Tahun 2023.

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 sampai dengan TW II. Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

- a. realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- b. realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

- a. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
- c. dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional;
- d. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
- e. formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini melampirkan perubahan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2023. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sifat penyebaran lokasi program/kegiatan, serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJADAN CAPAIAN IKU

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d. TW II Tahun 2023

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai dilakukan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah maupun RPJMD Kota Dumai. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan TW II dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2026. Jika sampai dengan TW II ditemukan program/kegiatan/subkegiatan yang target-targetnya tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai di akhir tahun rencana. Pada Tabel 2.1 berikut terlampir hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Inspektorat Daerah Kota Dumai

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (s.d. TAHUN 2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023		REALISASI KINERJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023		PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S.D. TAHUN 2023	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)	TINGKAT REALISASI (%)
			4	5	6	7	8	9						
6														
6 01														
6 01 01	INSPEKTORAT DAERAH													
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%											
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%											
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen											
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen											
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	1 Dokumen											
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen											
6 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen											
6 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen											
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen											
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen											
6 01 01 2.01 08	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD	4 Laporan											
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Bulan	14 OrgBln											
6 01 01 2.02 01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	8 Laporan											
6 01 01 2.02 02	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan											
6 01 01 2.02 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan											
6 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan											

KODE	URUSAN/BIKIDAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA TAHUN 2023		REALISASI KINERJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023		PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA S.D. TAHUN 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)	K	TINGKAT REALISASI (%)	TINGKAT REALISASI (%)
6 01 01 2 02 06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	0%	0 Laporan	0%	0%
6 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Aset Dengan Baik Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Laporan 4 Laporan	1.525.700.000	1 Laporan	118.759.250	-	-	-	-	-	154.431.800	5%	1 Laporan 1 Laporan	50% 25%	18%
6 01 03 2 03 06	Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan 4 Laporan	1.525.700.000	1 Laporan	118.759.250	-	-	0,4 Laporan	-	-	154.431.800	50%	1 Laporan 1 Laporan	25%	18%
6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Staf Baru Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	50 Staf 940 Orang	2.905.000.000	0 Staf	-	-	-	-	-	-	191.850.000	9% 4%	0 Staf 35 Orang	0% 4%	7%
6 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Alatnya Kepegawaian	Meningkatkan kinerja ASN untuk pergi ke Kantor Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Alatnya Kepegawaian	50 Staf 4 paket	505.000.000	0 Staf	-	-	-	0 paket	-	-	-	0%	0 Staf 0 paket	0%	0%
6 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	2.000.000.000	0 Orang	-	-	35 Orang	25 Orang	134.395.180	35 Orang	191.850.000	25%	35 Orang	25%	10%
6 01 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	800 Orang	400.000.000	0 Orang	-	-	200 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0%	0 Orang	0%	0%
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barisan Pakel Dinas Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan 4 Laporan	7.737.422.987	12 Bulan	602.546.600	-	-	-	-	-	668.093.368	100% 25%	12 Bulan 1 Laporan	100% 25%	16%
6 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen belalai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik/Elektronik Jumlah Paket Komponen belalai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan 8 paket	275.000.000	12 Bulan	19.161.600	-	-	1,32 paket	-	-	14.738.095	100%	12 Bulan 2 paket	100%	12%
6 01 01 2 06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan 4 paket	1.492.422.987	12 Bulan	112.504.800	-	-	0,64 paket	-	-	119.091.988	100%	12 Bulan 1 paket	100%	16%
6 01 01 2 06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Bulan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah penyediaan kebutuhan alat kesehatan Kantor	8 paket	690.000.000	0 paket	-	-	2 paket	-	-	-	22.930.000	25%	2 paket	25%	3%
6 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah penyediaan bahan logistik Kantor	12 Bulan 8 paket	835.000.000	12 Bulan	77.920.000	-	-	0,63 paket	-	-	119.502.855	100%	12 Bulan 2 paket	100%	24%
6 01 01 2 06 05	Penyediaan barang abahan dan perlengkapan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Pengoperan Kantor Perbulan yang diserahkan	12 Bulan	810.000.000	12 Bulan	45.932.200	-	-	0,88 paket	-	-	90.086.420	100%	12 Bulan 2 paket	100%	17%
6 01 01 2 06 06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Media Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan 4 Dokumen	195.000.000	12 Bulan	4.989.000	-	-	0,32 paket	-	-	4.988.000	100% 25%	12 Bulan 1 Dokumen	100% 25%	5%
6 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Orang Kali 170 Laporan	3.440.000.000	22 Orang Kali	342.078.000	-	-	20 Laporan	-	-	296.756.000	75% 18%	22 Orang Kali 30 Laporan	75% 18%	19%
6 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintahan	12 Bulan 381 unit	9.071.681.185	12 Bulan	566.270.850	-	-	-	-	-	197.346.000	100% 6%	12 Bulan 21 unit	100% 6%	8%
6 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 unit	-	0 unit	-	-	0 unit	-	-	1 unit	125.208.000	-	1 unit	-	-
6 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit 4 unit	2.098.000.000	0 unit	-	-	0 unit	-	-	0 unit	-	0%	0 unit 0 unit	0% 0%	0%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGRAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (6 d. TAHUN 2026)				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGRAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023				PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023				PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGRAN RENSTRA S.D. TAHUN 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit 220 unit	1.400.000.000	-	-	15 unit	170.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	-	0%	0 unit	-	0%
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perawatan dan Mesin Kantor Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit 150 unit	2.925.000.000	0 unit	386.502.850	20 unit	350.000.000	0 unit	-	20 unit	72.138.000	0 unit	-	20 unit	458.640.850	0%	458.640.850	0%	0 unit	-	16%
6 01 01 2.07 07	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Asat Kantor	4 unit	50.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	-	-	-	-	0 unit	-	0%	-	0%	0 unit	-	0%
6 01 01 2.07 08	Pengadaan Asat Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Asat Kantor Jumlah Unit Asat Tak Berwujud yang disediakan	11LS 1 unit	177.681.185	0LS	-	0 unit	-	0LS	-	0 unit	-	0 unit	-	0LS	-	0%	-	0%	0LS	-	0%
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	11LS 1 unit	1.200.000.000	1LS	179.768.000	1 unit	350.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	1LS	179.768.000	100%	179.768.000	100%	0 unit	-	15%
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	485.000.000	-	-	1 unit	150.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	-	0%	0 unit	-	0%
6 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	736.000.000	-	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	-	0%	0 unit	-	0%
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Habis Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	12 Bulan 8 Laporan	2.934.400.000	12 Bulan	352.244.900	2 Laporan	373.034.200	-	-	-	147.395.713	-	-	2 Laporan	275.762.960	100%	628.007.860	25%	12 Bulan 2 Laporan	-	21%
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat/Menyurat	Jumlah Bulan Surat Tektim	12 Bulan	8.000.000	0 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Bulan	-	0%	-	0%	0 Bulan	-	0%
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Perbulan Komunikasi dan Sumber Daya Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan 4 Laporan	430.000.000	12 Bulan	21.993.300	1 Laporan	22.000.000	0,48 Laporan	10.563.174	-	-	-	-	1 Laporan	22.000.000	100%	43.993.300	25%	12 Bulan 1 Laporan	-	10%
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Pelaksanaan Pawai Takbir	2 Kali	20.000.000	0 Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Kali	-	0%	-	0%	0 Kali	-	0%
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 2) Jumlah Jasa Keamanan Kantor 3) Jumlah Jasa Sopir Kantor 4) Jumlah Jasa Administrasi Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	216 Orang Bulan 4 Laporan	2.476.400.000	203 Orang Bulan	330.251.600	-	351.034.200	-	-	-	136.832.539	-	-	-	253.762.960	94%	584.014.560	94%	203 Orang Bulan 1 Laporan	-	24%
6 01 01 2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Asat Inspektori Daerah Kota Dumai Jumlah Barang Milik Peranglat Daerah yang Dipelihara	12 Bulan 484 unit	8.021.984.392	12 Bulan	642.557.000	63 unit	817.356.000	-	-	-	141.360.000	-	-	-	332.850.000	100%	975.407.000	100%	12 Bulan 62 unit	-	12%
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	7 unit 12 unit	938.200.000	7 unit	233.094.000	3 unit	137.400.000	0,7 unit	24.100.000	-	-	-	-	3 unit	100.680.000	100%	333.774.000	25%	7 unit 3 unit	-	36%
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 unit 42 unit	1.614.500.000	0 unit	-	9 unit	243.680.000	5 unit	104.060.000	-	-	-	-	9 unit	182.480.000	0%	182.480.000	21%	0 unit 9 unit	-	11%
6 01 01 2.09 03	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Kantor Jumlah Penilaian dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Bulan 425 unit	819.392.196	12 Bulan	24.015.000	50 unit	86.276.000	-	-	-	13.200.000	-	-	-	49.690.000	100%	73.705.000	100%	12 Bulan 50 unit	-	9%
6 01 01 2.09 04	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Asat Tetap Kantor	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	26.635.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	26.635.000	100%	12 Bulan 1LS	-	67%
6 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemeliharaan yang Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1LS 4 unit	4.400.000.000	1LS	358.813.000	1 unit	350.000.000	-	-	-	-	-	-	0 unit	-	100%	358.813.000	0%	1LS 0 unit	-	8%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA TAHUN 2023		REALISASI KINERJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023		PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S.D. TAHUN 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)	TINGKAT REALISASI (%)
6 01 01 2 08 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dioperasikan/dibatalasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dioperasikan/dibatalasi	1 unit	209.992.196	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	0%	-	0%
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	18.597.914.526	100%	3.345.000.000	100%	1.466.283.100	100%	2.747.278.600	15%	
6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	13.840.032.526	100%	2.745.000.000	93 Laporan	1.322.283.100	100%	2.528.365.100	18%	
6 01 02 2 01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70 LHP	4.110.032.526	1 Laporan	17.100.000	12 Laporan	99.900.000	85%	909.900.000	22%	
6 01 02 2 01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	48 Laporan	4.950.000.000	36 Laporan	206.700.000	36 Laporan	608.700.000	25%	608.700.000	12%	
6 01 02 2 01 03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Rewid dan Evaluasi Dokumen	14 Dokumen	1.740.000.000	42 Laporan	163.050.000	42 Laporan	299.224.100	79%	356.878.100	21%	
6 01 02 2 01 04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Rewi Laporan Keuangan dan Pengalihan Barang, Jasa Kota Dumai	188 Laporan	540.000.000	1 Laporan	30.774.272	1 Laporan	39.987.800	25%	81.949.800	15%	
6 01 02 2 01 05	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Keuangan	4 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		25%			
6 01 02 2 01 06	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	4 LHA	150.000.000	0 LHA	0%	0 LHA	0%	0%	570.937.200	0%	
6 01 02 2 01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	80%	2.350.000.000	88%	400.000.000	88%	274.471.200	108%		24%	
6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan yang Ditindaklanjuti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80%	4.757.882.000	17 laporan	76.050.000	17 laporan	144.000.000	100%	218.914.500	5%	
6 01 02 2 02 01	Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan Negara Daerah	Persentase Jumlah Kegiatan Daerah	80%	2.250.000.000	1 laporan	300.000.000	0 laporan	29.080.000	0%	29.080.000	1%	
6 01 02 2 02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelesaian kegiatan negara/daerah yang ditangani	4 laporan	2.507.882.000	4 LHP	76.050.000	4 LHP	114.920.000	16%	189.834.500	8%	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	25 LHP		16 laporan	107.150.900	100%	544.732.600	100%	1.171.392.800	9%	
6 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	13.703.418.000	100%	1.255.028.000	2 rekomendasi	114.052.000	100%	453.593.400	15%	
6 01 03 2 01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah APP yang Berkualitas yang disusun	8 rekomendasi	3.019.018.000	100%	255.028.000	2 rekomendasi	62.852.000	25%	117.397.600	8%	
6 01 03 2 01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis d bidang pengawasan yang disusun	4 rekomendasi	1.415.000.000	1 Dokumen	155.028.000	02 rekomendasi	10.407.000	100%	336.195.800	21%	
6 01 03 2 01 03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis d bidang fasilitas pengawasan yang disusun	55 Orang Kall	1.603.418.000	52 Orang Kall	19.305.500	1 rekomendasi	430.680.600	100%	717.799.400	7%	
6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	100%	10.684.400.000	15 perangkat daerah	77.438.400	15 perangkat daerah		100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (s.d. TAHUN 2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023		REALISASI KINERJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023		PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S.D. TAHUN 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)
6 01 03 2 02 01	Pendampingan dan Asistensi Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Ususan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah	2.200.000.000			3 perangkat daerah	200.000.000	1 perangkat daerah	5.550.000	3 perangkat daerah	18.000.000	25%	3 perangkat daerah	18.000.000	1%
6 01 03 2 02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Penilaian Mandiri yang Disaksikan Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	100%	2.300.000.000	100%	31.857.000	10 perangkat daerah	200.000.000	2 perangkat daerah	21.680.000	100%	158.580.000	10%	10 perangkat daerah	190.437.000	8%
6 01 03 2 02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen Jumlah Koordinasi, monitoring Verifikasi Pencapaian dan evaluasi serta verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	5 Dokumen 3 kegiatan	2.850.000.000	3 Dokumen	182.034.800	3 kegiatan	350.000.000	1 kegiatan	31.055.900	3 Dokumen 3 kegiatan	121.827.800	60% 100%	3 Dokumen 3 kegiatan	303.862.600	11%
6 01 03 2 02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencapaian Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Pencapaian Integritas	3 Dokumen 5 perangkat daerah	3.324.400.000	3 Dokumen	73.227.000	2 perangkat daerah	250.000.000	0,1 perangkat daerah	19.152.500	3 Dokumen 2 perangkat daerah	132.272.800	100% 25%	3 Dokumen 2 perangkat daerah	205.499.800	6%

Pada Tabel 2.1 diatas khususnya pada kolom 3, dapat kita lihat bahwa ada perubahan indikator kinerja kegiatan/subkegiatan pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian terhadap indikator kinerja kegiatan/subkegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, maupun pelaporan kinerja mulai tahun 2023, dan ditetapkan setelah tersusunnya APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pada periodisasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan TW II tahun 2023, maka dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua periodisasi RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026, artinya sampai dengan tahun 2023 minimal capaian masing-masing target keuangan program/kegiatan/subkegiatan adalah 20%, sedangkan capaian minimal output/outcome pada tahun 2022 adalah sebesar 100% dan tahun 2023 sebesar 25%. Berdasarkan evaluasi realisasi fisik dan keuangan sampai dengan tahun 2023 sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.1 diatas, maka beberapa kegiatan/subkegiatan yang diprediksi tidak mencapai target akhir yang direncanakan pada dokumen perencanaan jangka menengah diantaranya:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD; dan
 - 5) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD.

Meskipun kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tidak didukung oleh anggaran yang memadai, namun output dari setiap subkegiatannya tercapai karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- 1) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan
- 2) Subkegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

Sama halnya dengan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, meskipun kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah tidak didukung oleh anggaran yang memadai, namun output dari setiap subkegiatannya tercapai karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Tingkat realisasi keuangan kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini. Sedangkan untuk target output khususnya tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian pada perubahan dokumen perencanaan jangka menengah jika dimungkinkan.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

- 1) Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan, salah satunya yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. Inspektorat Daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan amanat tersebut pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Hal tersebut akan terealisasi jika ada dukungan anggaran dan komitmen dari TAPD.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- 1) Subkegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- 2) Subkegiatan pengadaan mebel;
- 3) Subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- 4) Subkegiatan pengadaan aset tak berwujud; dan
- 5) Subkegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- 6) Subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan, sementara Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 mengamanatkan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan, salah satunya yaitu sarana dan prasarana pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan amanat tersebut pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Hal tersebut akan terealisasi jika ada dukungan anggaran dan komitmen dari TAPD.

Disisi lain, khusus untuk subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, perlu dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan jangka menengah agar dokumen perencanaan dan penganggaran tetap terjaga sinkronisasinya.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tingkat realisasi fisik dan keuangan pada beberapa subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun barang milik daerah tersebut masih dapat difungsikan dengan baik. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.

i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini. Sedangkan untuk target output tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian pada perubahan dokumen perencanaan jangka menengah jika dimungkinkan.

j. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Tingkat realisasi fisik dan keuangan pada subkegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, oleh karena itu pada penganggaran perubahan subkegiatan ini menjadi salah satu subkegiatan yang diprioritaskan penambahan anggarannya agar outputnya tercapai. Sedangkan untuk subkegiatan penanganan penyelesaian kerugian Negara/daerah, meskipun tingkat realisasi keuangannya tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada subkegiatan ini. Sedangkan untuk target fisik dan keuangan tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian pada perubahan dokumen perencanaan jangka menengah jika dimungkinkan.

k. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.

l. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Seperti yang telah dijelaskan pada poin 1 “Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan” diatas, terdapat beberapa subkegiatan yang tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatannya sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada subkegiatan-subkegiatan tersebut.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan tahun 2023, tidak ada subkegiatan yang realisasi fisik maupun keuangannya melebihi target yang direncanakan. Namun terdapat 1 (satu) subkegiatan yang tidak direncanakan pada dokumen Renstra tetapi dianggarkan pada DPA Tahun 2023, yaitu subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan jangka menengah agar dokumen perencanaan dan penganggaran tetap terjaga konsistensinya.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Ada beberapa faktor yang diprediksi menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya terjadinya kesalahan dalam menetapkan target kinerja pada saat penyusunan dokumen Renstra, kurangnya komitmen untuk merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan, keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan, dan/atau alasan teknis lainnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Ketersediaan SDM dan anggaran yang terbatas sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra. Oleh karena itu, ketersediaan data dukung yang valid dan lengkap sangat dibutuhkan untuk menyusun target pada dokumen rencana agar tepat dalam menentukan indikator, baik target maupun pendanaan indikatifnya. Program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan karena kesalahan dalam menetapkan target kinerja maupun

pagu indikatif sebaiknya dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan perubahan dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(9)	(9)	(11)	(12)	(13)
1.	Level Maturitas SPIP			2	3	3	4	2	3	3	3	
2.	Level Kapabilitas APIP			2	3	3	4	2	3	3	3	
3.	Nilai SAKIP OPD			B	A	A	A	B	BB	BB	BB	
4.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI			75%	95%	95%	95%	75%	86%	86%	86,3%	
5.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP			75%	95%	95%	95%	75%	86%	87%	87,3%	
6.	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)			80%	100%	100%	100%	80%	0%	0%	0%	
7.	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di Lingkungan Inspektorat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) Level Maturitas SPIP.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan unsur-unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Unsur-unsur SPIP antara lain:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi antara lain:

1. Mekanisme penilaian, terdiri dari:
 - a. Penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 - b. Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

- 2. Fokus penilaian, pada tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi, mencakup unsur-unsur berikut:
 - a. SPIP;
 - b. Manajemen Risiko Indeks (MRI);
 - c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
 - d. Kapabilitas APIP, akan dilakukan penilaian tersendiri.
- 3. Komponen penilaian, terdiri dari:
 - a. Penetapan tujuan, untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.
 - b. Struktur dan proses, untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP.
 - c. Pencapaian tujuan, untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4. Periode yang dinilai dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan, berdasarkan:
 - a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP “Level 3 (Terdefinisi)” dengan nilai 3,127 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,000 serta skor IEPK sebesar 2,706 dengan rincian skor seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Kota Dumai

Fokus Penilaian	Bobot	Skor
Penetapan Tujuan	40%	1,400
Struktur dan Proses	30%	0,872
Pencapaian Tujuan	30%	0,855
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,127
Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		3,000
Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,706

Realisasi capaian level maturitas SPIP Kota Dumai Tahun 2022 sesuai dengan target level maturitas yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan untuk “Level Maturitas SPIP” sama dengan target di tahun 2022, yaitu “level 3”. Penilaian yang dilakukan oleh BPKP terhadap indikator ini dilakukan satu kali dalam setahun, dan penyampaian hasil penilaian biasanya dilakukan di awal tahun berikutnya, oleh karena itu sampai dengan TW II tahun 2023 ini, realisasi yang digunakan terhadap indikator ini adalah realisasi tahun 2022 yaitu “level 3”.

b) Level Kapabilitas APIP.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:

1. Mekanisme Penilaian, meliputi:
 - a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
 - c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Komponen Penilaian, terdiri atas:
 - a. Dukungan pengawasan;
 - b. Aktivitas pengawasan; dan
 - c. Kualitas pengawasan.
3. Aspek Penilaian, terdiri atas:
 - a. Kebijakan;
 - b. Implementasi; dan
 - c. Hasil.

4. Periode Penilaian:
- a. Penilaian Mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
 - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Dumai telah berada pada “Level 3 atau kategori *Delivered*” dengan skor sebesar 3,31 dari skor maksimal sebesar 5,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau

Elemen	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil QA oleh BPKP
Komponen dukungan pengawasan (<i>Enabler</i>)		
Pengelolaan SDM	0,72	0,54
Praktik professional Manajemen sumber daya manusia	0,72	0,72
Akuntabilitas dan manajemen kinerja	0,24	0,21
Budaya dan hubungan organisasi	0,18	0,18
Struktur tata kelola	0,36	0,36
Komponen aktivitas pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)		
Peran dan layanan	1,6	1,30
SIMPULAN ENTITAS	3,82	3,31
LEVEL	Level 3	Level 3

Dari tabel 2.4 diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil QA BPKP Perwakilan Provinsi Riau atas hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai, nilai kapabilitas APIP Kota Dumai berada pada level 3. Realisasi capaian level kapabilitas APIP Kota Dumai Tahun 2022 ini sesuai dengan target level kapabilitas APIP yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan untuk “Level Kapabilitas APIP” sama dengan target di tahun 2022, yaitu “level 3”. Penilaian yang dilakukan oleh BPKP terhadap indikator ini dilakukan satu kali dalam setahun, dan penyampaian hasil penilaian biasanya dilakukan di awal tahun berikutnya, oleh karena itu sampai dengan TW II tahun 2023 ini, realisasi yang digunakan terhadap indikator ini adalah realisasi tahun 2022 yaitu “level 3”.

c) Nilai SAKIP OPD.

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja OPD, yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja, meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi kinerja.

Evaluasi SAKIP internal Tahun 2022 kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 700-12.01.III/INSP/2022, dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal ini adalah metodologi kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dipilih atas pertimbangan kepraktisan, keterbatasan waktu dan ketersediaan SDM evaluator. Secara umum pelaksanaan evaluasi AKIP

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Instrumen yang digunakan dalam evaluasi adalah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menyajikan 4 (empat) komponen penilaian dengan masing-masing subkomponen, yang dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:

- a. perencanaan kinerja, bobot 30;
- b. pengukuran kinerja, bobot 30;
- c. pelaporan kinerja, bobot 15; dan
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25.

LKE disusun sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. Berdasarkan dokumen/informasi yang dikumpulkan, setiap kriteria yang dinilai pada LKE kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan “*Professional Judgements*” dari evaluator untuk menentukan bobotnya. Hasil pengisian LKE kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Evaluasi SAKIP internal Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dibagi ke dalam 3 (tiga) kluster dengan Perangkat Daerah yang dievaluasi pada masing-masing kluster adalah sebagai berikut:

- 1) Kluster Utama: (1) Dinas Kesehatan; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; (5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; (6) Dinas Perikanan; (7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (8) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; (11) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; (12) Satuan Polisi Pamong Praja; (13) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (14) Inspektorat Daerah; dan (15) Dinas Perdagangan.

- 2) Kluster Pendukung: (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Dinas Tenaga Kerja; (4) Dinas Lingkungan Hidup; (5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (7) Dinas Perhubungan; dan (8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 3) Kluster Tambahan: (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (2) Sekretariat DPRD; (3) Kecamatan Dumai Kota; (4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; (5) Kecamatan Dumai Timur; (6) Sekretariat Daerah; (7) Kecamatan Dumai Barat; (8) Kecamatan Dumai Selatan; (9) Kecamatan Bukit Kapur; (10) Badan Pendapatan Daerah; (11) Kecamatan Sungai Sembilan; (12) Rumah Sakit Umum Daerah; (13) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan (14) Kecamatan Medang Kampai.

Target yang ditetapkan untuk indikator “Nilai SAKIP OPD” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai adalah 81 dengan Predikat A. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2022, nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebesar 70,79 dengan Predikat BB, adapun nilai SAKIP pada masing-masing kluster adalah sebagai berikut:

- a. Kluster Utama : 69,42
- b. Kluster Pendukung : 72,36
- c. Kluster Tambahan : 71,36

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator ini di tahun 2022 tidak memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 88%. Secara umum kegagalan ini terjadi karena perencanaan kinerja dan strategi pencapaian pada beberapa Perangkat Daerah belum dirumuskan dengan baik sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, serta belum adanya keselarasan antara sasaran strategis dengan efektifitas penggunaan anggaran, sehingga masih diperlukan perbaikan lebih lanjut. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, maka perlu optimalisasi peran APIP pada tahap pengendalian, evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan yang merupakan bagian dari rangkaian proses evaluasi internal implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Kota Dumai.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan untuk “Nilai SAKIP OPD” pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah 83 dengan Predikat A. Berdasarkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2022, kemungkinan besar target yang ditetapkan pada tahun 2023 juga tidak bisa terealisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan target tahunan indikator ini pada dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 agar target yang ditetapkan lebih realistis dan mungkin untuk dicapai.

d) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK – RI yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK – RI}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK-RI” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 90%. Sampai dengan tahun 2022, jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau adalah sebanyak 479 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.114 rekomendasi. Dari total 1.114 rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 958, sebanyak 135 sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 9 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 12 temuan tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2022 adalah sebesar 86%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 96%. Kegagalan ini diantaranya disebabkan karena:

- Pemerintah Daerah tidak mengetahui bahwa sebenarnya sudah menindaklanjuti temuan karena bukti tindak lanjut tidak disampaikan kepada BPK; dan
- Tim penyelesaian kerugian daerah tidak berjalan efektif.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan untuk “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI” pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah 95%. Berdasarkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2022, kemungkinan besar target yang ditetapkan pada tahun 2023 juga tidak bisa terealisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan target tahunan indikator ini pada dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 agar target yang ditetapkan lebih realistis dan mungkin untuk dicapai.

e) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi APIP yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi APIP}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu sebesar 90%. Sampai dengan tahun 2022, jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 2.445 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 4.435 rekomendasi. Dari total 4.435 rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 3.819, sebanyak 180 sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 436 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tahun 2022 adalah sebesar 86%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 96%. Kegagalan ini diantaranya disebabkan karena:

- Sulit menentukan kepada siapa tindak lanjut harus dilakukan karena perubahan SOTK;
- Temuan/rekomendasi yang sama berlanjut ke tahun-tahun berikutnya; dan
- Tim penyelesaian kerugian daerah tidak berjalan efektif.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan untuk “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP” pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah 95%. Berdasarkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2022, kemungkinan besar target yang ditetapkan pada tahun 2023 juga tidak bisa terealisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan target tahunan indikator ini pada dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 agar target yang ditetapkan lebih realistis dan mungkin untuk dicapai.

f) Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang diusulkan berpredikat WBK dan WBBM s.d. tahun n}}{\text{Total OPD yang menjadi target berpredikat WBK dan WBBM}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 90%. Pada tahun 2022, tidak ada satupun Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM, karena di tahun 2022 Kota Dumai tidak termasuk Kabupaten/Kota yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengusulkan Perangkat Daerah berpredikat WBK dan WBBM. Akan tetapi tetap dilakukan pembinaan terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, maka persentase wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2022 adalah sebesar 0%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 0%.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan untuk “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah 100%. Berdasarkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2022, kemungkinan besar target yang ditetapkan pada tahun 2023 juga tidak bisa terealisasi karena penilaian WBK dan WBBM bukan kewenangan daerah. Pemerintah Daerah hanya mengusulkan Perangkat Daerah untuk dilakukan penilaian kelayakan sebagai WBK dan WBBM jika diminta oleh Kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang peninjauan ulang apakah “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” ini layak dijadikan sebagai indikator kinerja utama pada dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.

- g) Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah jenis pembinaan teknis dan administratif yang dilaksanakan}}{\text{total jenis pembinaan teknis dan administratif}} \times 100\%$$

h)

Target yang ditetapkan untuk indikator “Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu sebesar 100%. Adapun jenis pembinaan teknis dan administratif yang direncanakan antara lain: (1) pembinaan bidang administrasi umum dan kepegawaian; (2) pembinaan bidang perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja; (3)

pembinaan bidang keuangan dan asset; dan (4) pembinaan bidang pengawasan. Pada tahun 2022, keempat jenis pembinaan teknis dan administratif tersebut dilaksanakan dengan baik. Artinya, realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan untuk “Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah” sama dengan target di tahun 2022, yaitu 100%, dan diperkirakan realisasinya sampai dengan akhir tahun 2023 juga 100% karena pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif tetap harus dilakukan sekalipun tanpa dukungan sumber daya yang memadai.

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi diidentifikasi melalui permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan unsur pengawasan diantaranya:

1. Belum memadainya sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
4. Belum optimalnya penegakan integritas;
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP;
8. Kurangnya koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesegera mungkin;

9. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap program prioritas/strategis;
10. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan; dan
11. Terbatasnya anggaran untuk pendidikan profesional berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah Kota Dumai menyelenggarakan 6 (enam) fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 *“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik”*. Dari hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji diatas, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

1. Peluang:
 - a. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
 - b. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah;
 - c. Inspektorat Daerah Kota Dumai memiliki auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dengan disiplin ilmu yang beragam, sehingga bisa saling mensinergikan sudut pandang terhadap permasalahan audit;
 - d. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh standar audit dan kode etik serta peraturan/kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan pengawasan;

- e. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh pendidikan teknis dan non teknis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan;
 - f. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);
 - g. Peran APIP semakin dibutuhkan sebagai mitra dalam meningkatkan kinerja, khususnya sebagai kontrol dan evaluasi terhadap segala proses kerja yang dilakukan;
 - h. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aplikasi, *tools* dan metode pengawasan membantu pengembangan serta pemutakhiran program pengawasan sehingga dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran; dan
 - i. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Tantangan
- a. Alokasi sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan objek/entitas yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif;
 - b. Belum optimalnya perangkat Teknologi Informasi serta sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
 - c. Perlunya penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas APIP;
 - d. Perlunya peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah SDM APIP;
 - e. Optimalisasi pengawasan terhadap pengaduan masyarakat;
 - f. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
 - g. Aktivitas pengawasan oleh APIP melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* diarahkan untuk perbaikan GRC termasuk manage risiko dan memastikan pengendalian telah ada, dilaksanakan, dan efektif.
 - h. Praktik pengawasan harus sesuai standar profesi;
 - i. Berkembangnya paradigma pengawasan, yaitu APIP sebagai *strategic partner, quality assurance, and consulting*.

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah “**Peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penguatan peran dan kapasitas APIP**” agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, maka pada Tabel 3.1 berikut terlampir perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023. Dokumen perubahan Renja Tahun 2023 ini disusun bersamaan dengan penyusunan dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.

TABEL 3.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01	Perencana Ahli Muda					15.873.276.948					25.527.000.842	
6	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%	100%	15.216.307.036	13.011.311.248			100%		18.349.141.260	
6	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	267.819.000	150.381.100			6 Dokumen		450.000.000	
6	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	-	DTU - DBH		2 Dokumen		50.000.000	
6	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	DTU - DBH		1 Dokumen		50.000.000	
6	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	DTU - DBH		1 Dokumen		50.000.000	
6	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	DTU - DBH		0 Dokumen		-	
6	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	DTU - DBH		0 Dokumen		-	
6	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	0 Laporan	10.000.000	-	DTU - DBH		1 Dokumen		50.000.000	
6	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	207.819.000	150.381.100	DTU - DBH		1 Dokumen		250.000.000	
6	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	0 Laporan	10.350.928.836	10.124.789.752			2 Laporan		11.447.133.260	
6	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	10.320.928.836	10.124.789.752	DTU - DAU		55 Orang/Bulan		11.347.133.260	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
6	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	0 Laporan	20.000.000	-	DTU - DBH	1 Laporan	50.000.000
6	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	0 Laporan	10.000.000	-	DTU - DBH	1 Laporan	50.000.000
6	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	236.021.800		1 Laporan	350.000.000
6	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	236.021.800	DTU - DBH	1 Laporan	350.000.000
6	01	2.05	09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya		235 Orang	35 Orang	500.000.000	266.850.000		235 Orang	700.000.000
6	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Dumai	35 Orang	35 Orang	400.000.000	266.850.000	DTU - DBH	35 Orang	500.000.000
6	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Dumai	200 Orang	0 Orang	100.000.000	-	DTU - DBH	200 Orang	200.000.000
6	01	2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1.219.988.000	864.181.368		1 Laporan	1.853.000.000
6	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Dumai	2 paket	1 paket	25.000.000	14.738.095	DTU - DBH	2 paket	50.000.000
6	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Dumai	1 paket	3 paket	230.000.000	119.091.998	DTU - DBH	3 paket	318.000.000
6	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Dumai	2 paket	2 paket	150.000.000	22.930.000	DTU - DBH	2 paket	180.000.000
6	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Dumai	2 paket	4 paket	180.000.000	147.390.855	DTU - DBH	4 paket	175.000.000
6	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kota Dumai	2 paket	2 paket	130.000.000	90.086.420	DTU - DBH	2 paket	180.000.000
6	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Dumai	1 Dokumen	1 Dokumen	4.988.000	4.988.000	DTU - DBH	1 Dokumen	50.000.000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Dumai	30 Laporan	30 Laporan	500.000.000	371.756.000	DTU - DBH	30 Laporan	720.000.000	
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai	0 Dokumen	1 Dokumen	-	93.200.000	DTU - DBH	1 Dokumen	180.000.000	
6	01	01	2.07												
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasan		38 unit	12 unit	1.387.181.000	477.722.388		29 unit	2.272.000.000	
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kota Dumai	0 unit	1 unit	-	125.208.000	DTU - DBH	1 unit	200.000.000	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Dumai	1 unit	0 unit	367.181.000	-	DTU - DBH	1 unit	168.000.000	
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Dumai	15 unit	0 unit	170.000.000	-	DTU - DBH	15 unit	330.000.000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Dumai	20 unit	10 unit	350.000.000	166.089.000	DTU - DBH	10 unit	574.000.000	
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Dumai	1 unit	1 unit	350.000.000	186.425.388	DTU - DBH	1 unit	800.000.000	
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Dumai	1 unit	0 unit	150.000.000	-	DTU - DBH	1 unit	200.000.000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan		2 Laporan	2 Laporan	373.034.200	404.227.920		2 Laporan	537.000.000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Dumai	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000	33.000.000	DTU - DBH	1 Laporan	40.000.000	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Dumai	1 Laporan	1 Laporan	351.034.200	371.227.920	DTU - DBH	1 Laporan	497.000.000	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasan yang dipelihara		63 unit	63 unit	817.356.000	487.136.920		59 unit	740.008.000	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Dumai	3 unit	3 unit	137.400.000	100.680.000	DTU - DBH	1 unit	36.916.000	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	01	01	9 unit	9 unit	243.680.000	182.480.000	DTU - DBH	7 unit	273.092.000		
6	01	01	06	01	50 unit	50 unit	86.276.000	49.690.000	DTU - DBH	50 unit	180.000.000		
6	01	01	09	01	1 unit	1 unit	350.000.000	154.286.920	DTU - DBH	1 unit	250.000.000		
6	01	02			100%	100%	3.345.000.000	1.983.183.100		100%	4.477.859.582		
6	01	02	2.01		93 Laporan	115 Laporan	2.745.000.000	1.614.183.100		115 Laporan	3.325.000.000		
6	01	02	01	01	12 Laporan	5 Laporan	670.000.000	81.000.000	DTU - DBH	5 Laporan	1.000.000.000		
6	01	02	02	02	36 Laporan	50 Laporan	1.200.000.000	748.200.000	DTU - DBH	50 Laporan	1.250.000.000		
6	01	02	03	03	42 Laporan	57 Laporan	375.000.000	348.774.100	DTU - DBH	57 Laporan	405.000.000		
6	01	02	04	04	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	61.737.800	DTU - DBH	1 Laporan	120.000.000		
6	01	02	07	07	2 dokumen	2 dokumen	400.000.000	374.471.200	DTU - DBH	2 dokumen	550.000.000		
					17 laporan	16 laporan	600.000.000	369.000.000		16 laporan	1.152.859.582		
6	01	02	01	01	1 laporan	1 laporan	300.000.000	179.080.000	DTU - DBH	1 laporan	550.000.000		
6	01	02	02	02	16 laporan	15 laporan	300.000.000	189.920.000	DTU - DBH	15 laporan	602.859.582		
6	01	03			100%	100%	1.255.028.000	878.782.600		100%	2.700.000.000		
6	01	03			2 rekomendasi	2 rekomendasi	255.028.000	172.252.000		2 rekomendasi	550.000.000		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Kota Dumai	1 rekomendasi	1 rekomendasi	155.028.000	62.852.000	DTU - DBH		1 rekomendasi	250.000.000
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Kota Dumai	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100.000.000	109.400.000	DTU - DBH		1 rekomendasi	300.000.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi		15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	1.000.000.000	706.530.600			15 perangkat daerah	2.150.000.000
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	200.000.000	38.000.000	DTU - DBH		3 perangkat daerah	550.000.000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Dumai	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	200.000.000	182.525.000	DTU - DBH		10 perangkat daerah	500.000.000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Dumai	3 kegiatan	3 kegiatan	350.000.000	271.827.800	DTU - DBH		3 kegiatan	600.000.000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	Kota Dumai	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	250.000.000	214.177.800	DTU - DBH		2 perangkat daerah	500.000.000



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB IV
BAB IV

PENUTUP
PENUTUP

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 merupakan perubahan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perumusan perubahan Renja Inspektorat Daerah ini disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023, hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Penyusunan dokumen perubahan Renja Tahun 2023 ini disusun bersamaan dengan penyusunan Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, serta Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tepatnya Bab VII “Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah” Bagian Keenam “Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah”. Selanjutnya setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, perubahan dokumen rencana tahunan ini dijadikan acuan oleh Inspektur Daerah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2023.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAMPIRAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01				INSPEKTORAT DAERAH										13,846,485,720	15,873,276,948			25,812,000,842
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										0	0			0
6	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0			0
6	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen		0	0			50,000,000
6	01	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen		0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		50,000,000
6	01	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen		0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10,000,000
6	01	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen		0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10,000,000
6	01	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen		0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10,000,000
6	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										61,259,100	150,381,100			450,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
6 01 01 2.0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	6 Dokumen	1 Dokumen	61,259,100	150,381,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	250,000,000	
6 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,124,789,752	10,124,789,752				11,447,133,260		
6 01 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	53 Orang/bulan	55 Orang/bulan	2 Laporan	1 Laporan	10,124,789,752	10,124,789,752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	11,347,133,260	
6 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0		
6 01 01 2.0 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20,000,000	
6 01 01 2.0 2 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		"Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0					25,000,000	
6 01 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											154,431,800	236,021,800				375,000,000		
6 01 01 2.0 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	154,431,800	236,021,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	350,000,000	
6 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0		
6 01 01 2.0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
6 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										191,850,000	266,850,000				700,000,000		
6 01 01 2.0 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	35 Orang	35 Orang	235 Orang	35 Orang	191,850,000	266,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	500,000,000
6 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										648,529,613	864,181,368				1,903,000,000		
6 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Paket	1 Paket	1 Laporan	1 Laporan	14,738,095	14,738,095	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	50,000,000
6 01 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	3 Paket	1 Laporan	1 Laporan	119,091,998	119,091,998	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	318,000,000
6 01 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	1 Laporan	1 Laporan	22,930,000	22,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	180,000,000
6 01 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Paket	4 Paket	1 Laporan	1 Laporan	99,939,100	147,390,855	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	175,000,000
6 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	1 Laporan	1 Laporan	90,086,420	90,086,420	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	180,000,000
6 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	4,988,000	4,988,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas	100 %	50,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			Disediakan													inspektorat			
6 01 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	30 Laporan	30 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	296,756,000	371,756,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	720,000,000	
6 01 01 2.0 6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	93,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	180,000,000	
6 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											197,346,000	477,722,388				2,472,000,000		
6 01 01 2.0 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	38 Unit	12 Unit	125,208,000	125,208,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	200,000,000	
6 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0		
6 01 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				750,000,000	
6 01 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150 unit	150 unit			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				17,000,000	
6 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											197,346,000	477,722,388				2,472,000,000		
6 01 01 2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	20 unit	10 unit	38 Unit	12 Unit	72,138,000	166,089,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	574,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
6 01 01 2.0 7 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16 unit	16 unit			0	0				150,000,000	
6 01 01 2.0 7 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	
6 01 01 2.0 7 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			0	0				1,750,000,000	
6 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											197,346,000	477,722,388				2,472,000,000	
6 01 01 2.0 7 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	38 Unit	12 Unit	0	186,425,388	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	800,000,000
6 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
6 01 01 2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 unit	10 unit			0	0				130,000,000	
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
6 01 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12,000,000
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											274,400,000	404,227,920				547,000,000	
6 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Persentase penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah laporan penyediaan jasa	Kota Dumai, Bukit Kapur,	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22,000,000	33,000,000	Dana Transfer Umum - Dana		Persentase penunjang	100 %	40,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
	Sumber Daya Air dan Listrik	urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	Bagan Besar									Bagi Hasil		urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat		
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
6 01 01 2.0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100,000,000
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											274,400,000	404,227,920				547,000,000	
6 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	252,400,000	371,227,920	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	497,000,000
6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											332,850,000	487,136,920				740,008,000	
6 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasan yang dipelihara	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	3 unit	3 unit	63 Unit	63 Unit	100,680,000	100,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	36,916,000
6 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasan yang dipelihara	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	63 Unit	63 Unit	182,480,000	182,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	273,092,000
6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
6 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 unit	4 unit			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				160,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											332,850,000	487,136,920				740,008,000	
6 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasan yang dipelihara	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	50 Unit	50 Unit	63 Unit	63 Unit	49,690,000	49,690,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	180,000,000	
6 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasan yang dipelihara	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	63 Unit	63 Unit	0	154,286,920	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	100 %	250,000,000	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											1,466,283,100	2,012,583,100				4,477,859,582	
6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											1,322,283,100	1,643,583,100				3,325,000,000	
6 01 02 2.0 1 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	12 Laporan	5 Laporan	93 Laporan	115 Laporan	99,900,000	81,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	1,000,000,000	
6 01 02 2.0 1 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	36 Laporan	50 Laporan	93 Laporan	115 Laporan	608,700,000	777,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	1,250,000,000	
6 01 02 2.0 1 03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	42 Laporan	57 Laporan	93 Laporan	115 Laporan	299,224,100	370,524,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	405,000,000	
6 01 02 2.0 1 04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	93 Laporan	115 Laporan	39,987,800	39,987,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	120,000,000	
6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											0	0					0
6 01 02 2.0 1 06	Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pemeiksaan kerjasama Internal		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 laporan	4 laporan			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			170,000,000	
6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											1,322,283,100	1,643,583,100					3,325,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
6 01 02 2.0 1 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	93 Laporan	115 Laporan	274,471,200	374,471,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	550,000,000	
6 01 02 2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											144,000,000	369,000,000				1,152,859,582		
6 01 02 2.0 2 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	17 Laporan	16 Laporan	29,080,000	179,080,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	550,000,000	
6 01 02 2.0 2 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	16 Laporan	15 Laporan	17 Laporan	16 Laporan	114,920,000	189,920,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	602,859,582	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											394,746,355	849,382,600				2,700,000,000		
6 01 03 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan											114,052,000	142,852,000				550,000,000		
6 01 03 2.0 1 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	62,852,000	62,852,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	250,000,000	
6 01 03 2.0 1 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	51,200,000	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	300,000,000	
6 01 03 2.0 2	Pendampingan dan Asistensi											280,694,355	706,530,600				2,150,000,000		
6 01 03 2.0 2 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	18,000,000	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	550,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6 01 03 2.0 2 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	74,730,000	182,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	500,000,000
6 01 03 2.0 2 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	121,827,800	271,827,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	600,000,000
6 01 03 2.0 2 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	66,136,555	214,177,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	500,000,000
TOTAL												13,846,485,720	15,873,276,948				25,812,000,842	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							19,816,335,036	13,846,485,720	15,873,276,948					25,812,000,842				
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pengawas inspektorat	%		%	100 %	100 %	15,216,307,036	11,985,456,265	13,011,311,248					100 %	18,634,141,260			
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	267,819,000	61,259,100	150,381,100					1 Dokumen	450,000,000			
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	30,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0 Dokumen	50,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0 Dokumen	50,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0 Dokumen	50,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	0 laporan	10,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0 laporan	50,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	207,819,000	61,259,100	150,381,100	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	250,000,000	INSPEKTORAT	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	1 Laporan	10,350,928,836	10,124,789,752	10,124,789,752					1 Laporan	11,447,133,260		
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	10,320,928,836	10,124,789,752	10,124,789,752	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	55 Orang/bulan	11,347,133,260	INSPEKTORAT
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	20,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0 Laporan	50,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	0 Laporan	10,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0 Laporan	50,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	154,431,800	236,021,800					1 Laporan	375,000,000		
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	154,431,800	236,021,800	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	350,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang		Orang	235 Orang	35 Orang	500,000,000	191,850,000	266,850,000					35 Orang	700,000,000		
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	400,000,000	191,850,000	266,850,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	35 Orang	500,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				200 Orang	0 Orang	100,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN	0	0 Orang	200,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	DAERAH				
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,219,988,000	648,529,613	864,181,368					1 Laporan	1,903,000,000		
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	25,000,000	14,738,095	14,738,095	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Paket	50,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	230,000,000	119,091,998	119,091,998	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	3 Paket	318,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150,000,000	22,930,000	22,930,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Paket	180,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	180,000,000	99,939,100	147,390,855	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	4 Paket	175,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	130,000,000	90,086,420	90,086,420	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Paket	180,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 dokumen	1 dokumen	4,988,000	4,988,000	4,988,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 dokumen	50,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	500,000,000	296,756,000	371,756,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	30 Laporan	720,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	0	0	93,200,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	180,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	Unit		Unit	38 Unit	12 Unit	1,387,181,000	197,346,000	477,722,388						12 Unit	2,472,000,000	
6 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	125,208,000	125,208,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Perimbangan		05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Unit	200,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	367,181,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0 Unit	168,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0 Unit	170,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0 Unit	330,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 unit	10 unit	350,000,000	72,138,000	166,089,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	10 unit	574,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350,000,000	0	186,425,388	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Unit	800,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	150,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN	0	0 Unit	200,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													DAERAH					
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	373,034,200	274,400,000	404,227,920					2 Laporan	547,000,000		
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,000,000	22,000,000	33,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	40,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	351,034,200	252,400,000	371,227,920	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	497,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasan yang dipelihara	Unit		Unit	63 Unit	63 Unit	817,356,000	332,850,000	487,136,920					63 Unit	740,008,000		
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit	3 unit	137,400,000	100,680,000	100,680,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	3 unit	36,916,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	243,680,000	182,480,000	182,480,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	9 Unit	273,092,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	86,276,000	49,690,000	49,690,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	50 Unit	180,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 Unit	1 Unit	350,000,000	0	154,286,920	Kota Dumai, Bukit Kapur,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR	0	1 Unit	250,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Bagan Besar	Hasil	Transformasi Pelayanan Publik	AAN PEMERINTAHAN DAERAH				
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%		%	100 %	100 %	3,345,000,000	1,466,283,100	1,983,183,100					100 %	4,477,859,582		
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan		Laporan	93 Laporan	115 Laporan	2,745,000,000	1,322,283,100	1,614,183,100					115 Laporan	3,325,000,000		
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	5 Laporan	670,000,000	99,900,000	81,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	5 Laporan	1,000,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				36 Laporan	50 Laporan	1,200,000,000	608,700,000	748,200,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	50 Laporan	1,250,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				42 Laporan	57 Laporan	375,000,000	299,224,100	348,774,100	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	57 Laporan	405,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	39,987,800	61,737,800	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	120,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	400,000,000	274,471,200	374,471,200	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Dokumen	550,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan		Laporan	17 Laporan	16 Laporan	600,000,000	144,000,000	369,000,000					16 Laporan	1,152,859,582		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	29,080,000	179,080,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	550,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				16 Laporan	15 Laporan	300,000,000	114,920,000	189,920,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	15 Laporan	602,859,582	INSPEKTORAT
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%		%	100 %	100 %	1,255,028,000	394,746,355	878,782,600					100 %	2,700,000,000		
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	Rekomendasi		Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	255,028,000	114,052,000	172,252,000					2 Rekomendasi	550,000,000		
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	155,028,000	62,852,000	62,852,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Rekomendasi	250,000,000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,000,000	51,200,000	109,400,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Rekomendasi	300,000,000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	1,000,000,000	280,694,355	706,530,600					15 Perangkat Daerah	2,150,000,000		
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	200,000,000	18,000,000	38,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	3 perangkat daerah	550,000,000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	200,000,000	74,730,000	182,525,000	Kota Dumai, Bukit Kapur,	Dana Transfer Umum- Dana Bagi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR	0	10 perangkat daerah	500,000,000	INSPEKTORAT

Kota Dumai
Tahun 2023

TOTAL

25,812,000,842



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan program prioritas pembangunan daerah serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2023 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 23 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 23 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Agustus 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 35 SERIE